

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional II*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Baharudin A. Ubani, *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, PB. Masyarakat, hlm 27
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung. PT. Alumni, 2010
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991
- Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung, Nusa Media, 2009
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*(edisi kesepuluh), Jakarta: SinarGrafika
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi Indonesia 2014*, Direktorat Informasi dan Media, Jakarta Pusat, 2015, hlm 210
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung. PT. ALUMNI, 2003
- Narzif, *Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Buku II : *Tentang Hubungan Konsuler*, Universitas Andalas, 2007
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Ke II, Jakarta, SinarGrafika, 2012, hlm 1
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGraffindo Persada, 2016, hlm 146
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayu Media, Malang, 2008

Siswanto Sunarso *Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah Pidana, Instrumen penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik. Teori dan Kasus*, Bandung, PT. ALUMNI, 2005

Syahmin, *Hukum Diplomatik, Rajawali Pers*, Jakarta, 2008

## **B. Aturan Hukum**

### **1. Hukum Internasional**

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

*Vienna Convention on Consular Relations 1963*

### **2. Hukum Nasional**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang pengesahan konvensi Wina 1963 mengenai hubungan diplomatic dan hubungan Konsuler.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 , *tentang Kementerian Luar Negeri dan pokok-pokok organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri*, (pasal 1 ayat 1).

Peraturan Menlu No. 04 Tahun 2008 tentang Sistem Pelayanan Warga pada perwakilan Diplomatik dan Konsuler di Luar Negeri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Kannun Kesseksaan, *Malaysia Criminal Code (Law. No 299-300)*, Bab XVI

## C. Website

Hassan Wirayuda, *Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, di akses pada 21 Juli 2016

<http://amp.kompas.com/internasional/read/2017/02/25/07134021/terkait.pembunuhan.kim.jong.nam.indonesia.diizinkan.temui.tersangka.siti.aisyah>, diakses, Sabtu 25 Februari 2017, 07:30 WIB

<http://internasional.kompas.com/read/2018/03/07/08211951/as-korea-utara-perintahkan-pembunuhan-kim-jong-nam-dengan-racun-vx>

<http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/kedutaan-besar-ri-di-kualalumpur/>.

<http://kjripenang.tripod.com/html/konsuler.html>, diakses tanggal 10 Juni 2014

<http://m.detik.com>, pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un/diakses Jumat, 28 Juli 2017, 11:12 WIB.

<http://m.merdeka.com/dunia/upaya-pemerintah-bebaskan-siti-aisyah--dari-hukum-gantung-di-malaysia.html>

<http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/layanan-publik/pelayanan-perlindungan-wni-bhi.aspx>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, di akses, Selasa, 11 Agustus 2015, Pukul 15:14 WIB

<http://www.researchgate.net/publication/311779962the-important-of-mandatory-consular-notifikation-between-indonesia-and-other-foreign-states>, diakses Kamis, 08 Maret 2018 WIB

<https://amp.tirto.id/kepala-bnp2tki-klaim-siti-aisyah-bukan-tki-di-malaysia-cjhN>

<https://kumparan.com/@kumparanews/kemlu-malaysia-berulang-kali-tangkap-wni-tanpa-pemberitahuan>, diakses, Selasa, 23 Januari 2018, 20:39 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-siti-aisyah>, diakses, 18 Februari 2017, 21 : 01 WIB.

[www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id), di akses tanggal 30 Maret 2015